



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**

**Ketua Dewan Pers,
Bagir Manan**

**Pers Akan
sangat Kritis
terhadap Peristiwa
Politik 2014**



HAL
4-6

Workshop Jurnalis
Perempuan:

Diantara Keriuhan
Peringatan Hari Pers
Nasional Indonesia

HAL
7

**Pers
Harus Berubah
Hadapi
Konvergensi**

HAL
11

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

**Pers Diharapkan Kritis,
Obyektif dan Bangunkan
Optimisme Bangsa**

HAL
2



**Kode Etik Filantropi:
Penting Bagi Para Pemangku
Kepentingan di Media**

HAL
8



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pers Diharapkan Kritis, Obyektif dan Bangunkan Optimisme Bangsa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pers dapat menyuarakan dua hal penting. Yakni, agar pers bersikap kritis dan obyektif, serta membangun optimisme dan keyakinan bangsa.

Memberikan sambutan pada peringatan ke-28 Hari Pers Nasional (HPN) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/2), Presiden SBY menyatakan poin pertama, merupakan kewajiban moral bagi pers untuk mengkritisi dan mengoreksi apa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah. "Saya selalu menyimak kritik pers dan pengamat, misalnya terhadap masih banyaknya kasus korupsi, belum baiknya birokrasi, kurang responsifnya aparat keamanan untuk menanggulangi kekerasan, dan banyaknya pemberian izin yang bermasalah dan tumpang tindih di tingkat daerah," Presiden SBY seraya menambahkan: "Semua itu saya dengar. Saya berharap semua lembaga negara beserta pejabatnya mendengarkan, menyimak, dan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan di dalam mengelola kehidupan bernegara dan menjalankan roda pemerintah.



BUKU KARYA JURNALISTIK — Presiden SBY menerima buku karya jurnalistik Indonesia dari Ketua Umum PWI Pusat Margiono, pada peringatan HPN 2013 di Manado, Sulut, Senin (11/2). (foto: abrord/presidensby.info)

Kedua, kata Presiden SBY, di tengah masih banyaknya kekurangan dan ketidakberhasilan, tidak sedikit pula keberhasilan yang kita capai. "Yang dicapai negara ini, yang hakikatnya juga keberhasilan kita semua sejak negeri kita mengalami krisis besar 15 tahun yang lalu," ujarnya.

Kalau tidak ada keduanya, lanjut Kepala Negara, rakyat Indonesia akan bingung dan mempertanyakan mengapa pihak internasional dan pers asing yang juga terkenal kritis, mau dan mengkritik Indonesia, tetapi di sisi lain mereka juga

berani memberikan apresiasi bila capaian kita bagus. "Ini barangkali kita kurang murah hati untuk melakukan hal itu," ujar Presiden SBY.

Di bagian lain sambutannya, Presiden kembali mengingatkan agar dunia jurnalistik ikut berkontribusi secara aktif dan konstruktif agar politik, demokrasi, dan pemilihan umum dijalankan makin matang, berkualitas, dan bermartabat. "Berikan ruang yang cukup dan relatif adil bagi semua peserta pemilu," katanya sambil menambahkan: "Ikutlah menyebarluaskan visi, opsi, dan



solusi yang ditawarkan oleh setiap kandidat, termasuk nanti para calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian rakyat akan bisa menguji dan mengkritisi apakah solusi dan tindakan yang dijanjikan itu realistis apa tidak.”

Presiden SBY menegaskan, insan pers juga diharapkan turut serta memperkenalkan sosok, integritas, dan kapasitas calon anggota legislatif. Sesungguhnya televisi, radio, surat kabar, media online, bahkan media sosial adalah milik rakyat. “Bukan hanya milik partai-partai politik serta para calon anggota legislatif, ataupun calon-calon presiden semata,” SBY menandakan.

Pena Wartawan

Di bagian lain sambutannya Presiden mengingatkan, kekuasaan selalu mengundang godaan. Oleh karena itu, pers sebagai salah satu pilar demokrasi selalu menggunakan kekuasaannya dengan penuh amanah dan bertanggung jawab.

“Dimana pun di dunia ini, pemegang kekuasaan selalu menghadapi godaan. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan dan mengajak kita semua untuk pandai-pandai, dengan penuh amanah, menggunakan kekuasaan itu untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” katanya.

Presiden SBY kemudian menuturkan kisah Napoleon

Bonaparte. Panglima perang Perancis itu pernah mengatakan bahwa pena wartawan lebih tajam dan mematikan dibanding pedang. Mengacu pada relevansi tersebut pena haruslah digunakan untuk mematikan kejahatan dan menghidupkan kebaikan. “Kalau kita salah menggunakan pedang atau pena maka akan menimbulkan malapetaka dan ketidakadilan,” ujarnya.

Presiden menambahkan: “Kita membunuh dan menusuk secara sembarangan tentu itu menimbulkan ketidakadilan. Setetes darah dari siapapun yang ditusuk baik dari pedang atau pena, padahal orang itu tidak bersalah, maka akan berubah menjadi ketidakadilan,” ujarnya menutup sambutannya.

Dapat ditambahkan, pada kesempatan itu Presiden SBY menandatangani prasasti Monumen dan Museum Alex Impurung Mendur dan Frans Soemarto Mendur. “Mari kita teladani kepahlawanan, kepedulian, dan apa yang dilakukan mereka untuk negerinya pada masa-masa yang paling bersejarah,” kata Presiden SBY.

HPN ini diisi antara lain dengan sejumlah kegiatan seperti *workshop*, dialog, sepeda santai, donor darah, hiburan untuk rakyat, pameran foto dan pameran buku wartawan. HPN 2013 juga menganugerahi Presiden ke 3 RI BJ Habibie medali emas kemerdekaan pers, sedangkan Presiden SBY menerima buku *Karya Jurnalistik Indonesia* dari Ketua Umum PWI Margiono. (*presidensby.info*)

“ Kita membunuh dan menusuk secara sembarangan tentu itu menimbulkan ketidakadilan. Setetes darah dari siapapun yang ditusuk baik dari pedang atau pena, padahal orang itu tidak bersalah, maka akan berubah menjadi ketidakadilan. ”

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A.
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bakti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Pers Akan sangat Kritis terhadap Peristiwa Politik 2014

Setahun telah berlalu sejak kita berkumpul di Jambi untuk acara HPN, 2012. Selama setahun sangat banyak pemberitaan pers mengenai berbagai peristiwa yang terjadi dan kita alami. Ada peristiwa yang memprihatinkan. Ada peristiwa yang menyenangkan dan mendorong kita optimis.

Musibah banjir yang meluas, letusan gunung api, tsunami, gelombang laut yang mengganas dan menghambat kelancaran pelayaran dan usaha nelayan, berbagai kecelakaan kendaraan di darat, di laut, dan udara, gangguan keamanan dan berbagai kekerasan terhadap penduduk sipil, termasuk kekerasan terhadap wartawan, dan korupsi yang tidak kunjung menyurut, sungguh memprihatinkan kita semua.

Di balik itu, pemberitaan pers mengenai fakta-fakta pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi, merupakan suatu kegembiraan dan mengokohkan rasa optimis kita semua. Kalau pun ada persoalan, terutama yang acap kali menjadi sorotan pemberitaan dan investigasi pers, adalah bagaimana mewujudkan korelasi yang nyata antara berbagai kemajuan atau



pertumbuhan itu dengan tujuan dan cita-cita pemerataan kesejahteraan, pemerataan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengiringi pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Bung Karno mengatakan: tujuan kemerdekaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bung Hatta sejak masa pergerakan sampai akhir hayat tidak pernah berhenti mengingatkan soal-soal kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Hatta sedikitpun tidak pernah goyah keyakinannya mengenai kemustian demokrasi. Namun di bidang politik, beliau senantiasa mengingatkan, kebebasan dalam berdemokrasi ada batas. Demokrasi harus disertai tanggung jawab. Berdemokrasi yang tidak mengenal batas kebebasan

dan tidak disertai tanggung jawab akan menjadi anarki. Dalam kaitan kebebasan ini, tidak jarang pers menjadi obyek pembicaraan. Pers kita terlalu bebas bahkan kebablasan. Namun saya meminta, sekiranya dapat dipertimbangkan untuk melihat pula segi tanggung jawab. Sebagai institusi publik, pers tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan persoalan rakyat banyak. Kebebasan pers hendaknya dilihat dari perspektif tanggung jawab pers kepada publik. Kebebasan pers atau pers merdeka bukanlah hanya sebagai instrumen politik tetapi juga instrumen publik atau sosial bahkan instrumen budaya. Semestinya persoalan tidak diukur dari rasa tanggung jawab kebebasan pers, tetapi kepentingan masa depan bangsa, negara, dan rakyat kita. Tetapi kalau dapat saya menambahkan, anarki tidak saja datang karena rakyat atau pers terlalu bebas dan tidak berdisiplin. Anarki dapat juga sebagai konsekuensi kegagalan para pemimpin—baik di sektor negara atau masyarakat—menjadi teladan, baik ketika menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun dalam peri kehidupan



sehari-hari. Teladan dalam tanggung jawab, teladan dalam disiplin, teladan dalam integritas, teladan dalam memelihara dan menjalankan setinggi-tingginya tuntunan moral atau etika..

Demokrasi Ekonomi

Di bidang ekonomi, almarhum Bung Hatta tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang demokrasi ekonomi sebagai wujud paham kekeluargaan atau gotong royong. Instrumen kerakyatan di bidang ekonomi adalah koperasi. Koperasi menurut beliau selain menjalankan fungsi ekonomi kerakyatan, tidak kalah penting, sebagai instrumen mendidik rakyat mandiri, memiliki harga diri, solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial. Karena itu, Bung Hatta tidak menyatakan koperasi sekedar sebagai bentuk badan usaha atau korporasi. Beliau juga tidak sekedar melihat koperasi sebagai bagian dari birokrasi negara. Koperasi menurut Bung Hatta adalah sebuah gerakan, yang lazim disebut sebagai gerakan koperasi. Koperasi adalah pergerakan kerakyatan di bidang ekonomi yang sekaligus sebagai wadah membangkitkan harga diri atau kepribadian dan solidaritas sosial. Menurut hemat saya, pada saat ini, soal-soal harga diri

atau kepribadian dan solidaritas sosial perlu mendapat perhatian yang mendalam. Suatu ketika Bung Karno mengatakan, kepemimpinan dalam paham kekeluargaan atau gotong royong yaitu menyatunya antara pemimpin dengan yang dipimpin atau rakyat. Tidak boleh ada jarak antara pemimpin dengan rakyat. Tidak boleh sekali-kali perhatian pemimpin terhadap rakyat hanya terjadi lima tahunan atau sekali dalam lima tahun.

Tahun Politik

Dalam mekanisme lima tahunan itu, pers sungguh-sungguh menyimak penilaian Bapak Presiden bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan akan banyak riak politik menuju tahun 2014. Komunitas pers sangat sependapat dengan penilaian Bapak Presiden. Pers akan berusaha memenuhi harapan Bapak Presiden, bahwa pers akan mengambil bagian terdepan untuk menjaga proses demokrasi tahun 2014 agar berjalan secara tertib, damai, jujur dan adil sebagai bagian dari memantapkan atau mendewasakan demokrasi. Demokrasi yang matang bukan sekedar dalam proses politik, tetapi menjadi *way of life* dan budaya. Tetapi sebagai pranata atau institusi publik, suara pers atau arah politik pers semata-

mata dalam perspektif publik yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan menghasilkan para penyelenggara yang memiliki keterikatan secara total (*totally committed*) dengan kepentingan rakyat banyak. Karena itu, dapat dipastikan pers bukan saja memberi perhatian tetapi akan sangat kritis terhadap peristiwa politik besar tahun 2014. Bukan saja sebagai ujian kematangan demokrasi, tetapi pers atas nama publik akan meminta agar setiap orang yang akan mengambil bagian dalam penyelenggaraan negara, harus dapat menunjukkan kepada publik, pandangan dan program yang akan dikerjakan. Kami dengan sungguh-sungguh menyerukan, belilah hati dan suara rakyat dengan tanggung jawab, bukan dengan janji-janji tanpa makna dan *money politics*.

Secara konstitusional, Bapak Presiden akan mengakhiri jabatan sebagai Kepala Negara dan tidak dapat lagi turut serta dalam pemilihan tahun 2014. Namun sebagai pemimpin bangsa, kami komunitas pers memohon Bapak tetap memimpin mengantarkan perubahan yang akan terjadi itu sebagai peristiwa yang memberi jaminan perjalanan bangsa menuju apa yang disebut,

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



masyarakat Indonesia yang *loh jinawi toto tenterem kerto raharjo*. Masyarakat sejahtera, makmur, maju dan adil baik mereka yang ada di kota, di desa, di pantai, di bukit, atau di gunung.

Uji Kompetensi

Ada satu hal lagi yang acap kali dicatat pers yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari kita semua. Di tengah-tengah kemajuan dan pertumbuhan ekonomi itu, kita menghadapi berbagai *social tention* seperti ketidakpuasan kaum pekerja (buruh), kerusuhan masyarakat perdesaan yang merasa tanah-tanah mereka diubah untuk usaha-usaha perkebunan besar tanpa memperhatikan hal-hal tradisional mereka yang justru dijamin UUD 1945.

Dalam kaitan ini, acapkali ada salah pengertian atas pemberitaan pers. Seolah-olah pers yang membesar-besarkan suatu peristiwa sosial semacam itu. Harus kami akui, masih ada pers yang merasa akan laku dengan cara-cara pemberitaan yang bombastis. Tetapi pada umumnya—terutama pers yang telah memiliki tradisi pemberitaan yang terukur, hal-hal yang diberitakan itu semata-mata suatu fakta. Kalaupun ada bagian yang ditekan-tekan, semata-mata untuk menggugah semua pihak untuk prihatin dan peduli atas segala musibah atau kepedihan yang menimpa

sebagian saudara kita sebangsa dan setanah air. Dapat saya sampaikan, Dewan Pers, Asosiasi Pers tidak pernah mendiamkan cara-cara pemberitaan yang berlebihan apalagi tidak faktual. Melalui mekanisme penegakan kode etik telah dilakukan berbagai tindakan. Selain itu, komunitas pers tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas. Selain berbagai pelatihan, sarasehan, komunitas pers sedang menjalankan program *uji kompetensi wartawan* (UKW). Pada masa depan, setiap wartawan diwajibkan menempuh ujian dan memiliki sertifikat kompetensi. Uji Kompetensi ini tidak hanya dilakukan secara internal komunitas pers, melainkan melibatkan juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Pada saat ini sudah lebih dari 3000 wartawan yang menempuh ujian sertifikasi tersebut. Perjalanan masih panjang, karena kita memiliki antara 30.000 – 40.000 wartawan. Namun, sekali lagi, pers sebagai institusi publik juga tidak boleh mengecilkan atau tidak mepedulikan berbagai peristiwa sosial yang menimbulkan berbagai ketegangan sosial semacam itu. Selain itu, pers ingin pula mengajak untuk melihat dan merenungkan peristiwa-peristiwa itu bukan sekedar sebuah fakta, tetapi apakah ada faktor-faktor sosial yang lebih

mendalam seperti tuntutan keadilan, merasa terpinggirkan atau sebagai manifestasi ketidakberdayaan. Hal ini sangat penting, jangan sampai kita terbelenggu oleh hal-hal simtomatik dan asumsi-asumsi tanpa memasuki akar-akarnya. Kalau dalam pemberitaan atau investigasi, ada bagian yang terasa pahit, semata-mata karena tuntutan pengabdian kepada publik sebagai ibu kandung pers. Mudah-mudahan dalam suasana demokrasi yang makin matang, hal-hal semacam itu akan diterima semua pihak sebagai sebuah kemestian dalam setiap tatanan hidup berdemokrasi.

Terlepas dari berbagai latar-belakang tersebut, berbagai kerusuhan yang merusak harta benda, mencederai orang-orang yang tidak bersalah, bukanlah bagian dari hak atas kebebasan berekspresi (*the right of expression*). Bukan pula sekedar mengganggu ketertiban umum. Kerusuhan yang merusak harta benda dan mencederai orang-orang yang tidak berdosa adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, sudah semestinya ada cara-cara penindakan yang lebih tegas sesuai dengan peluang yang diatur hukum tanpa harus menimbulkan pelanggaran baru hak asasi manusia.***

Catatan: Sambutan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di HPN 2013, di Manado pada 11 Februari 2013 ini telah dihilangkan tegur sapaunya dan diberi sub judul seperlunya. – Red



Workshop Jurnalis Perempuan: Diantara Keriuhan Peringatan Hari Pers Nasional Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan (Hari Pers Nasional) HPN tahun 2013 yang diselenggarakan pada 6 hingga 11 Februari di Manado, Uni Lubis, Anggota Dewan Pers, menjadi salah satu narasumber pada workshop yang bertemakan Jurnalis Perempuan. Di dalam workshop tersebut ada dua narasumber yakni Uni Lubis, Pemimpin Redaksi ANTV, dan Petty S Fatimah, Pemimpin Redaksi Majalah *Femina*. Kedua jurnalis perempuan ini ditemani oleh Pemimpin Redaksi Majalah *Historia*, Bonnie Triyana yang dengan elegan bertindak sebagai moderator. Sebagai satu-satunya pria di panggung, Bonnie Triyana memberikan latar belakang sejarah jurnalis Indonesia dimana kaum wanita merupakan pelaku aktif sebagai wartawan dan kiprah mereka sudah dimulai bersamaan dengan terbitnya media cetak yang dikenal di Indonesia hingga sekarang.

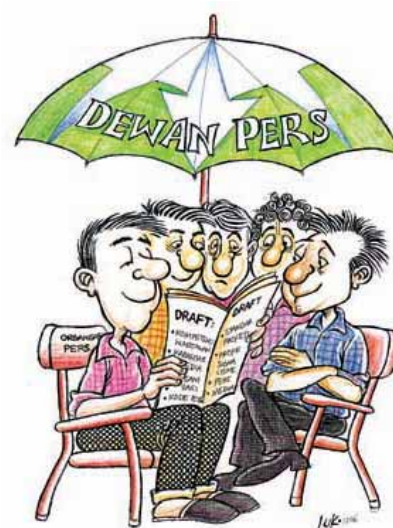
Workshop yang diadakan di Manado Town Square tersebut terlihat meriah karena diselenggarakan di tengah-tengah keramaian aktivitas perayaan HPN Indonesia. Kemeriahan diskusi jelas diperkuat dengan tema menarik yang membuat banyak perempuan, baik dari berbagai bidang di luar jurnalistik maupun pelajar yang

berminat, mengikuti diskusi dengan cermat. Selama acara berlangsung, kaum pria pun banyak yang mendengarkan dengan perhatian walaupun mereka tidak mendapatkan tempat duduk di depan panggung workshop karena ramainya para peserta perempuan. Beberapa di antara kaum pria, bahkan ada seorang bupati yang turut serta, mengikuti jalannya diskusi dari balkon mall di tingkat dua dari Manado Town Square tersebut.

Diskusi dimulai dengan *sharing* pengalaman kedua jurnalis senior yang memberikan penegasan bahwa bekerja sebagai jurnalis merupakan pilihan, dan jauh dari kesan mewah. Keduanya juga memberikan tips yang menarik bagaimana bertahan dan mengembangkan karier serta menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh kaum hawa dalam melaksanakan tugas profesi sebagai wartawan adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerja maupun pihak lain yang ada di komunitas pekerjaan. Baik Uni Lubis maupun Petty menyarankan agar jurnalis perempuan tidak kecil hati saat menghadapi berbagai tantangan melainkan tetap membuka komunikasi dengan para editor dan rekan-rekannya di tempat mereka bekerja.

Diskusi tentang jurnalis perempuan ini ditutup dengan berbagai pertanyaan dari para peserta yang berkenaan dengan cara menghadapi ketidakpercayaan para pimpinan, menjalankan peran ganda wanita, sampai rencana pensiun. Mereka yang memberikan pertanyaan menarik tersebut mendapatkan hadiah berupa buku *Blur* yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang diterjemahkan oleh Dewan Pers. Buku yang memberikan *blueprint* media massa pada masa depan itu tidak bisa dibeli di toko buku di Indonesia dan karenanya merupakan suatu hadiah yang berharga bagi jurnalis perempuan Indonesia.

Karikatur



Kode Etik Filantropi: Penting Bagi Para Pemangku Kepentingan di Media

Media massa di Indonesia terkenal mampu mencerminkan rasa dermawan dan kegotong-royongan para pembacanya. Di dalam semua kasus malapetaka dan musibah baik di tingkat nasional maupun regional, media massa selalu berada di garda depan dalam menerima sumbangan dari masyarakat yang terketuk untuk menolong sesama yang sedang dilanda kesusahan. Angka-angka sumbangan tersebut mencapai jumlah total sumbangan yang tinggi dan bahkan mencapai angka milyaran rupiah apabila media tersebut memiliki oplah dan reputasi yang baik.

Dewan Pers menyebut kegiatan media massa dalam menjembatani serta menggalang 'kedermawanan sosial masyarakat' yang sekarang populer dengan istilah filantropi sebagai perwujudan dari kepedulian sosial media massa serta bagian dari fungsi dan peran sosial media massa yang bersangkutan. Mengingat pengumpulan uang tersebut berasal dari dana publik, dan karenanya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka Dewan Pers dan Perhimpunan Filantropi Indonesia berhasil membuat Kode Etik Filantropi Media Massa.

Dalam rangka sosialisasi Kode Etik ini, Anggota Dewan Pers Uni Lubis di dalam presentasinya di Manado pada Sabtu, 9 Februari 2013 menyatakan syarat yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas media massa dalam menjalankan kegiatan filantropi di Indonesia. Syarat tersebut antara lain, kegiatan filantropi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di tengah-tengah para jurnalis yang datang memadati acara Dewan Pers di Manado untuk merayakan Hari Pers Nasional Indonesia, Uni Lubis menegaskan bahwa fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan dan instrument edukasi bagi para pengelola sumbangan masyarakat di perusahaan media yang berupa penggalangan dan penerimaan, pengelolaan serta penyaluran dana yang terkumpul dari masyarakat. Selain itu, Kode Etik Media Massa ini ditujukan

untuk melindungi perusahaan media dari kepentingan pihak yang tidak bertanggung-jawab yang ingin menggunakan kesempatan penggalangan dana ini untuk kepentingan politisnya.

Secara sederhana, prinsip penyelenggaraan Filantropi harus memenuhi azas kesukarelaan, independensi, profesionalisme, non-diskriminasi, tepat-guna dan tepat-sasaran, serta komitmen organisasi. Azas kesukarelaan itu harus memenuhi sifat sumbangan Filantropi, antara lain, bersifat sukarela, terbuka dan etis, serta sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang dipergunakan adalah kerangka peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang telah diajak urun-rembuk dalam rangka penyusunan Kode Etik Filantropi Media Massa ini. Hal lain yang diatur adalah penggunaan rekening yang harus berbeda dari rekening untuk operasional perusahaan media, kesantunan

>> Bersambung ke hal. 9



Prinsip penyelenggaraan Filantropi harus memenuhi azas kesukarelaan, independensi, profesionalisme, non-diskriminasi, tepat-guna dan tepat-sasaran, serta komitmen organisasi.



Bagian 1 dari 3 Tulisan

PERS BERMUTU

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

1. Pembukaan

Tulisan ini sengaja mengambil sepotong (penggalan) dari tema HPN: "Pers Bermutu Bangsa Maju" dengan beberapa pertimbangan:

Pertama; usaha membangun pers bermutu merupakan salah satu tugas utama Dewan Pers (bersamaan dengan tugas menjaga kemerdekaan pers, menjaga kode etik pers, dan tugas-tugas lain).

Kedua; untuk menghindari kemungkinan salah pengertian (salah persepsi), seolah-olah pers mengklaim, pers maju identik dengan bangsa maju, seolah-olah bangsa baru akan maju, kalau pers maju. Pers maju merupakan salah



Bagir Manan

satu petunjuk (indikator) bangsa maju. Ada sejumlah petunjuk lain yang juga merupakan satu *conditio sine qua non* bangsa maju, yaitu: kehadiran kesejahteraan,

kehadiran kemakmuran yang merata, kehadiran kecerdasan umum, kehadiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kehadiran pranata (institusi) politik, sosial, ekonomi dan lain-lain yang terbuka, akuntabel, dan bersih. Pers adalah subsistem dari berbagai indikator tersebut. Di satu pihak, pers dapat sangat berperan mendorong perwujudan berbagai indikator kemajuan yang diharapkan itu. Di pihak lain, dalam berbagai hal, pers maju tergantung pada tingkat kesejahteraan, kemakmuran, kecerdasan, tatanan politik dan lain-lain.

>> Bersambung ke hal. 12

>> Sambungan hal. 8

penayangan pemberian sumbangan, dan pelaporan sumbangan kepada para pemangku kepentingan.

Beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh peserta Hari Pers Nasional 2013 di Manado berkaitan dengan penggunaan rekening yang berbeda dari rekening operasional perusahaan. Uni menjelaskan perbedaan rekening dana sumbangan adalah untuk memudahkan pemisahan

dari dana operasional sehari-hari serta untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah terkumpul dan dikelola. Sifat independensi dalam pengelolaan dana sumbangan ini mengingat bahwa sifat kegiatan filantropi bersifat sementara seperti saat terjadinya pengelolaan dana sumbangan atas terjadinya bencana alam sehingga harus ada rekening yang bersifat ad-hoc. Adapun untuk rekening dana yang dibuka untuk kegiatan se-

panjang tahun, Uni Lubis menekankan kembali pentingnya perbedaan dengan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) karena perusahaan media massa tidak boleh menggunakan dan mengaku bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut sebagai program pelayanan masyarakatnya.

Kode Etik Filantropi Media Massa ini dapat dipelajari lebih jauh di <http://www.dewanpers.or.id/page/search/data/?caridata=Kode%20Etik%20Filantropi#focus>.



Hasil Penyelesaian Pengaduan KEJ Februari 2013

Dewan Pers berhasil menyelesaikan dua pengaduan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada Februari 2013. Kali ini pengadu adalah Kamsul Hasan atas berita *Global TV* dan media siber www.viva.co.id. Kamsul yang juga bergerak di *media watch* itu dalam pengaduannya ke Dewan Pers tanggal 18 Desember 2012 mempersoalkan berita *Fokus Selebriti* tentang kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Andika Eks “Kangen Band” pada 18 Desember 2012. Sedangkan atas pemberitaan www.viva.co.id. Kamsul mempersoalkan berita berjudul: “Mantan Vokalis Kangen Band, Andika Mengaku Telah Mencabuli Seorang ABG” (edisi 18 Desember 2012).

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers melakukan klarifikasi pengadu dan teradu, pada 1 Februari 2013. Dewan Pers menilai tayangan *Global TV* tersebut melanggar Pasal 5 KEJ karena tidak menyamarkan identitas korban kejahatan kesusilaan. *Global TV* telah menyadari kesalahannya tersebut, karena itu Dewan Pers mengapresiasi.

Sementara itu, berita www.viva.co.id juga melanggar Pasal 5 KEJ karena tidak menyamarkan identitas korban

kejahatan kesusilaan. Media siber ini telah mengoreksi berita tersebut sebagai bentuk itikad baiknya. Dalam hal ini, www.viva.co.id menjelaskan sekuen berita tersebut. Pada awalnya dikabarkan ada gadis di bawah umur hilang, sehingga berita tersebut harus disebutkan data secara rinci. Kemudian, karena berita itu berkembang menjadi dugaan pelecehan seksual, maka seluruh identitas gadis tersebut disamarkan, sesuai dengan KEJ. Sayangnya, media siber lain sudah keburu mengutip berita awal www.viva.co.id

Atas pelanggaran KEJ tersebut, Dewan Pers merekomendasikan *Global TV*

wajib memberikan pelatihan peningkatan pemahaman KEJ kepada wartawan yang berkontribusi atas pelanggaran tersebut. Sementara kepada www.viva.co.id, Dewan Pers merekomendasikan untuk melakukan koreksi sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Sesuai butir 4 huruf b Pedoman Pemberitaan Media Siber memang semestinya informasi koreksi ditampilkan dalam berita yang mengandung kesalahan, sehingga koreksi diketahui oleh media lain yang mengutip berita dimaksud, meskipun tanggung jawab ada pada media yang mengutip itu.



Rombongan Dewan Pers yang dipimpin Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, bertemu Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief pada Selasa, 5 Februari 2013 dalam rangka silaturahmi untuk memperkokoh peningkatan keterbukaan informasi di lingkungan instansi Kejaksaan RI. (<http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/kunjungan Dewan Pers.jpg>)



Pers Harus Berubah Hadapi Konvergensi

Manado (Berita Dewan Pers) – Persoalan konvergensi media terus menjadi pembicaraan komunitas pers Indonesia. Sebab, konvergensi media sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan tuntutan efisiensi, telah mendorong perubahan dalam proses pembuatan konten berita dan distribusinya.

Konvergensi media mendorong terjadinya reorganisasi di dalam manajemen bisnis media dan pengelolaan ruang redaksi. Saat ini, media-media besar di Indonesia terus berbenah untuk mengintegrasikan cara distribusi konten melalui audio, visual, teks cetak dan online ke dalam satu gerak. Kemampuan kerja wartawan dalam berbagai sisi (wartawan multitasking) juga terus ditingkatkan.

Banjir informasi dan tuntutan berita cepat saji tidak boleh menyebabkan wartawan meninggalkan jurnalisme yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Wartawan harus menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan sebagai satu seni.

Demikian beberapa pemikiran yang berkembang dalam Konvensi Media Massa dengan subtema Pers Menghadapi Tantangan Konvergensi Media yang digelar di Novotel Manado, Sulawesi Utara, Jumat (8/2). Hadir sebagai nara-

sumber, Wahyu Muryadi (Pemimpin Redaksi majalah *Tempo*), Trias Kuncayono (Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*), dan Ronny Sugiadha (Managing Director *Okezone.com*).

Konvensi Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2013 ini mengambil tema utama “Pers Merajut Kejayaan Indonesia.” Konvergensi media menjadi salah satu subtema yang dibahas di dalam Konvensi. Subtema lain yang dibahas secara terpisah yaitu “Tantangan Pers Menyelamatkan Budaya Indonesia” dan “Pers dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.”

Ceruk Iklan

Menurut Wahyu Muryadi, tren konvergensi media mutlak diikuti oleh pengelola pers. Keengganan atau lambat mengikuti tren tersebut akan menyebabkan pers tergilas perkembangan zaman. Kehadiran konvergensi (media baru) sebenarnya membuka ceruk baru iklan yang tidak diperoleh jika hanya mengandalkan media cetak.

Dalam menghadapi konvergensi media dan perkembangan internet, media harus melakukan reorganisasi. Pada saat yang sama, ciri khas setiap media harus tetap dipertahankan sebagai bentuk keunggulan kompetitif.

“Sekarang informasi adalah many to many,” kata Wahyu Muryadi. Tugas pers lebih seperti menjernihkan atau mengklarifikasi informasi yang banyak tersebar melalui berbagai teknologi komunikasi. “Membantu masyarakat menyaring informasi,” lanjutnya.

Trias Kuncayono menegaskan, perkembangan internet saat ini dapat membuat jurnalisme lebih baik. Jurnalisme ke depan adalah kombinasi antara nilai jurnalisme tradisional dan penggunaan teknologi modern. Jurnalisme tradisional yang dimaksud adalah jurnalisme yang taat etika dan memiliki tanggung jawab sosial. Jurnalisme ini tidak boleh ditinggalkan karena munculnya teknologi komunikasi modern.

“Jurnalisme saat ini adalah gabungan antara nilai-nilai utama jurnalisme tradisional dan keterampilan teknologi baru,” katanya.

Ronny Sugiadha menambahkan, konvergensi media telah menghilangkan batasan antara wartawan cetak, foto, online, radio dan televisi.

“Tantangan utama untuk bisa mengembangkan sinergisitas ini (konvergensi) justru terletak di internal masing-masing pengelola media. Sedangkan publik, tidak akan pernah mempermasalahkan bagaimana proses sebuah konten bisa dihadirkan,” ungkapnya. (red)



>> Sambungan hal. 9

2. Pers bermutu dalam makna dinamis

Pers bermutu. Apakah itu? Apakah sebuah pers yang dikelola oleh pengelola dan dijalankan secara profesional, memenuhi segala standar etik serta semua syarat-syarat jurnalistik serta merta menjadi pers yang bermutu. Mungkin ada yang mengatakan, ya. Mungkin pula ada yang mengatakan belum. Bagi yang mengatakan belum, berpendapat ada unsur-unsur lain yang juga penting, seperti kejelasan keberpihakan pada publik, non partisan dan lain sebagainya.

Meskipun ada standar-standar normatif dan atau etik, standar pengelolaan (management), atau standar politik seperti kehadiran demokrasi, *pers bermutu tidak mungkin bermakna statis tetapi dinamis*. Mutu pers ditentukan oleh perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan lingkungan yang senantiasa berubah. Ada ungkapan yang mengatakan, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Kalau ditarik ke lingkungan pers, maka pers bermutu apabila senantiasa mampu merespons perubahan lingkungannya, baik dalam makna mengiringi perubahan, menggerakkan perubahan maupun mendorong perubahan.

Kesadaran makna pers bermutu semacam itu (senantiasa dalam dinamika) akan mendorong insan atau pengasuh pers selalu

berpikir ke arah kemajuan dan menemukan kebaruan (*newness*), jauh dari rasa kemapanan. Setiap bentuk atau wujud kemapanan akan melahirkan konservatisme atau anti perubahan. Itulah yang acap kali terjadi di bidang politik. Semula suatu gerakan politik sangat reformis, sangat pro kemajuan, sangat pro publik. Tetapi karena nikmat kekuasaan (Montesquieu mengatakan kekuasaan itu mengandung *greedy*), merasa mapan, berubah menjadi konservatif, bahkan anti perubahan. Kekuasaan semacam itu akan berangsur-angsur menjadi sewenang-wenang, menindas dan tiranis.

Bagi pers kita, menanamkan rasa untuk terus melakukan perubahan merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari.

Pertama; pers, baik sebagai institusi publik, institusi politik, maupun sebagai institusi ekonomi, mesti berubah mengikuti dinamika sosial, dinamika politik, dan dinamika ekonomi, dan dinamika budaya di sekitarnya. Pada saat tertentu, mungkin dapat terjadi semacam *tention* antara pers sebagai institusi publik dengan pers sebagai institusi politik dan institusi ekonomi yang menjauh dari kepentingan dan cita-cita publik. Dalam keadaan seperti itu, sangat dituntut agar pers berdiri teguh di sisi publik sebagai ibu kandung yang harus dijaga dan dipelihara. Pers sebagai institusi politik dan institusi ekonomi, tidak

boleh sekali menjadi semata-mata alat kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang mengorbankan kepentingan publik. Pers yang menanggalkan kepentingan publik sebagai akar naturalnya, akan ditinggalkan publik. Itu merupakan lonceng kematian.

Kedua; kemajuan ilmu dan teknologi, c.q. ilmu dan teknologi komunikasi (media). Kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada semua sendi-sendi pers, mulai dari ketenagaan pers, pengelolaan pers, sampai pada aturan tingkah laku pers (etik dan hukum). Kita mengenal media sosial dengan segala aspek dan instrumennya yang mengubah secara mendasar pengertian dan termasuk aktivitas pers (masih dalam perdebatan). Meskipun ilmu dan teknologi bukan satu-satunya pendorong perkembangan media sosial, tetapi juga faktor-faktor politik, ekonomi, dan lain-lain, tetapi peran ilmu dan teknologi sangat menentukan intensitas media sosial. Perubahan pengertian dan bentuk-bentuk aktivitas pers akibat kehadiran media sosial sangat mempengaruhi hubungan pers tradisional dengan publik, sistem pengelolaan pers, dan yang tidak kalah penting adalah *press attitude and behaviour* yang akan menuntut penyesuaian etik dan aturan-aturan pers.

Bersambung ke Edisi Etika mendatang

